SINERGITAS HUKUM ADAT DAN PERATURAN DAERAH DALAM PENGENDALIAN DAMPAK PARIWISATA TERHADAP PURA AGUNG BESAKIH DI KABUPATEN KARANGASEM

Oleh

I Made Hendra Wijaya, SH.,MH

I Made Asmara Jaya, SH.,MH

I Putu Bagus Merling Sudiarmika

Abstract

Synergy of Customary Law and Regional Regulation in Controlling the Impact of Tourism on the Besakih Agung Temple in Karangasem Regency can be seen with the issuance of the Bali Governor Regulation No. 51 of 2016 concerning Management of the Besakih Agung Temple and Pararem Besakih Indigenous Village with number 38 / DAB / IX / 2017, which regulates the existence of Operational Management (MO) Managing the Agung Besakih Temple Area for tourism control over the Agung Besakih Temple in Karangasem Regency

Keywords, : *Costumary Law, Ragional Regulations, Beaakih Tample*

1. Latar Belakang

Bali dikenal sebagai daerah tujuan wisata yang sangat populer, tidak saja di Indonesia tetapi juga di mancanegara. Citra dan identitas Bali sebagai daerah tujuan wisata yang indah, agung, eksotis, lestari, dengan perilaku masyarakatnya yang ramah dan bersahaja, ditopang oleh adat istiadat dan budayanya yang berdasarkan pada prinsip keharmonisan dan keseimbangan dengan bertumpu pada nilai-nilai Agama Hindu dan falsafah hidup *Tri Hita Karana*. Kedua ajaran ini saling berkaitan, di mana agama Hindu menjiwai falsafah *Tri Hita Karana*, dan sebaliknya falsafah *Tri Hita Karana* berdasarkan pada ajaran agama Hindu.

Pengembangan pariwisata di Bali saat ini mengacu kepada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kepariwisata Budaya Bali yang belandasaskan kepada kemajuan pariwisata Bali namun tetap mempertahankan keberadaan budaya Bali sehingga terciptanya keserasian, selaras yang seimbang antara kebudayaan Bali dengan kemajuan Pariwisata yang ada di Bali. Namun

dalam perkembangan pariwisata yang ada di Bali terutama di Pura Agung Besakih sebagai salah satu kawasan wisata yang banyak dikunjungi oleh Pariwisata juga memiliki beberapa permasalahan, seperti halnya dapat dilihat pada tahun 2016 terdapat peristiwa pungutan liar yang terjadi di areal Pura Agung Besakih, dimana wisatawan yang berkunjung ke Pura Agung Besakih diminta sumbangan sebesar Rp 200.000 dan untuk turis asing diminta sumbangan sebesar US\$50¹, berdasarkan berita CNN Indonesia tersebut pemandu wisata juga melakukan hal yang sama. Turis dipaksa menggunakan jasa pemandu wisata yang ada di lingkungan pura dan mematok harga yang cukup besar. “Kepada turis pemandu minta minimal US\$20 atau hampir Rp260 ribu. Itu dipaksa². Masih di tahun 2016, seorang warga negara asing pernah mengaku diperas sebesar 500 ribu untuk masuk ke areal Pura Agung Besakih, sehingga dari kejadian tersebut Dinas Pariwisata Kabupaten Karangasem sudah melaporkan peristiwa tersebut³, dan saat ini pelaku

yang melakukan pungutan liar sudah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian⁴.

Kemudian di tahun 2017 terjadi peristiwa di mana seorang wisatawan asing yang berasal dari Spanyol menaiki *Padmasana* di Pura gelap Besakih, yang mana kejadian tersebut terjadi pada saat semua warga di lereng Gunung Agung mengungsi. Praktis, aksi Bernat luput dari pantauan pecalang dan aparat kepolisian karena kompleks Pura Agung Besakih saat itu kosong, sehingga peristiwa tersebut diduga berada di kompleks suci itu tanpa panduan *guide*⁵. Dari peristiwa diatas, sangat diperlukan perhatian khusus dari berbagai pihak, namun untuk memberikan perhatian yang khusus tentu saja memerlukan sebuah teknis dalam menjaga Pura Agung Besakih dari dampak-dampak negatif sebagai tempat pariwisata selain tempat pesembahyangan umat Hindu di Bali, Maka dari dibutuhkan pengaturan yang jelas antara hukum yang bersifat nasional dan hukum yang bersifat adat, sehingga dalam pelaksanaan perlindungan Pura Agung Besakih tidak menjadi konflik norma maupun konflik kewenangan dalam menjaga keberadaan Pura Agung Besakih kedepannya, apalagi Pura Agung Besakih selain menjadi tempat wisata, namun Pura Agung Besakih juga dikenal sebagai Pura Khayangan Jagat dan juga sebagai ibu dari pura-pura di Bali yang berdasarkan keyakinan masyarakat Bali yang beragama Hindu, bahwa keberadaan Pura Agung Besakih sangat diyakini memiliki aura yang suci yang sangat baik untuk kehidupan masyarakat Bali, maka dari itu perlu adanya perhatian yang khusus terhadap kelestarian dari Pura Agung Besakih walaupun menjadi kawasan wisata yang harus diperhatikan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesucian Pura Agung Besakih.

2. Bentuk Sinergitas Hukum Adat dengan Peraturan Daerah Dalam Mengelola Pura Agung Besakih Sebagai Bentuk Pengendalian Dampak Negatif Pariwisata

Untuk melihat bentuk sinergitas hukum adat dengan peraturan daerah dalam mengelola Pura Agung Besakih sebagai bentuk pengendalian dampak negatif pariwisata di Bali, terlebih dahulu

dalam tulisan ini melihat dasar pemikiran atau filosofis dari hukum adat di Bali. Filosofis yang menjadi dasar di setiap hukum adat di Bali adalah *Tri Hita Karana* yang dibagi menjadi *Parhyangan, Palemahan, Pawongan*.

Dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerinth Daerah terkait dengan pengelolaan Kawasan Pura Agung Besakih sebagai kawasan wisata, tak lepas dari filosofis *Tri Hita Karana*, seperti halnya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kepariwisata Budaya Bali, di dalam Pasal 2 tentang asas dan tujuan dari di terbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 TentangKepariwisataBudaya Bali, yaitu penyelenggaraan kepariwisataan budaya bali dilaksanakan berdasarkan pada asas manfaat, kekeluargaan, kemandirian, keseimbangan, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, adil dan merata, demokratis, kesetaraan dan kesatuan yang dijiwai oleh nilai nilai Agama Hindu dengan menerapkan falsafah *Tri Hita Karana*. Selain Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kepariwisata Budaya Bali, filosofis *Tri Hita Karana* juga terdapat dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Kawasan Pura Agung Besakih yaitu di dalam menimbangny menyatakan bahwa Kawasan Pura Agung Besakih merupakan kawasan suci dan mercusuaranya pulau Bali yang memiliki kekhasan adat dan budaya dilandasi filosofi *Tri Hita Karana* yang dijiwai oleh agama Hindu.

Terkait dengan sinergitas antara hukum adat khususnya hukum adat Desa Pakraman (Desa Adat) Besakih dan Peraturan Daerah khususnya Peraturan Gubernur Bali Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Kawasan Pura Agung Besakih terkait dengan pengelolaan kawasan Pura Agung Besakih yaitu jika kita hubungkan dengan adanya filosofis *Tri Hita Karana*, yang di dalamnya berisikan *Parhyangan, Pawongan dan Palemahan*, maka dalam pengelolaan Kawasan Pura Agung Besakih, Desa Pakraman (Desa Adat) Besakih mengatur tentang *Parhyangan*, hal tersebut dapat dilihat di dalam hukum adat Desa

Pakraman (Desa Adat) Besakih yaitu dalam dalam Caturtata Sargah Sukerta Tata Agama Palet 1 Kaping 5 mengenai *Indik Penyanggran* Pura Agung Besakih *Awig-Awig* Desa Adat Besakih sedangkan terkait *Pawongan* dan *Palemahan* dalam mengelola kawasan Pura Agung Besakih dapat dilihat dalam Pasal 2 Peraturan Gubernur Bali Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Kawasan Pura Agung Besakih yaitu terkait dengan ruang lingkupnya meliputi *Pawongan* dan *Palemahan* yang sesuai dengan *Tri Hita Karana*, seperti halnya *Pawongan* mencakup pengaturan, pemberdayaan dan peningkatan sumber daya manusia (masyarakat) di kawasan Pura Agung Besakih dan masyarakat pengunjung Pura Agung Besakih dan *Palemahan* mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian hingga evaluasi terhadap keseluruhan sarana dan prasarana lingkungan di kawasan Pura Agung Besakih.

Jika dilihat lebih lanjut, di dalam *Pararem* atau hukum adat turunan dari awig-awig Desa Pakraman (Desa Adat) Besakih dengan nomor 38/DAB/IX/2017, bahwa melalui *Pararem* tersebut yang diputuskan dalam musyawarah desa (*Paruman*) Desa Pakraman (Desa Adat) Besakih, *pareram* tersebut mengatur mengenai pedagang acung yang diatur didalam Pasal 1 (*pawos 1*) mengenai pedagang acung (*Indik Pedagang Acung*), pedagang sarung yang diatur dalam Pasal 2 (*pawos 2*) mengenai pedagang Sarung (*Indik Pedagang Sarung*), pemandu wisata yang diatur dalam Pasal 3 (*pawos 3*) mengenai pemandu wisata (*Indik Pemandu Wisata*), jasa transportasi yang diatur dalam Pasal 4 (*pawos 4*) mengenai Jasa Transportasi (*Indik Jasa Transportasi*), jasa penyewaan toilet yang diatur dalam Pasal 5 (*pawos 5*) mengenai Jasa Penyewaan Toilet (*Indik jasa Penyewaan Toilet*), jasa penyewaan payung yang diatur dalam Pasal 6 (*pawos 6*) mengenai Jasa Penyewaan Payung (*Indik Jas Penyewaan Payung*), jasa fotografi yang diatur dalam Pasal 7 (*pawos 7*) mengenai Penyewaan Fotografi (*Indik Penyewaan Fotografi*), jasa pendaki gunung yang diatur dalam Pasal 8 (*pawos 8*) mengenai Jasa

Pendaki Gunung (*Indik Jasa Pendaki Gunung*), warga pendatang (*tamiu*) yang bekerja di Desa Pakraman (Desa Adat) Besakih seperti yang terdapat di dalam Pasal 1 (*pawos 1*) Point 3 yang menyebutkan *Patiwak Pamidanda ring warga tamiu sane mamurung, wentwn paetangan tios manut paigum Prajuru Desa Adat*, selanjutnya di dalam Pasal 3 (*pawos 3*) point 1 menyebutkan *Pramuwisata khusus Besakihlan Pemandu Wisata pemandu wisata saking dura desa, tan kalugra nenten kaddosang ngenter utawi nganter wisatawan ngranjing ring salae (25) Pura Pakideh Pura Besakih (Manut ring Peraturan Gubernur Bali Nomor 51 Tahun 2016*. Dalam Pasal 9 (*pawos 9*) yang mengenai denda (*indik pamidanda*) dan dalam Pasal 10 (*Pawos 10*) yang mnegenai kewenangan pelaksanaan Pararem (*Indik pangrajeg Pararem*) yang berisikan kewenangan desa adat dan Manajemen Operasional (MO) Pengelolaan Kawasan Pura Agung Besakih dalam menjaga Pura Agung Besakih

3. Bentuk Sinergitas Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Kawasan Pura Agung Besakih Sebagai Bentuk Pengendalian Dampak Negatif Pariwisata

Bentuk Sinergitas Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Kawasan Pura Agung Besakih Sebagai Bentuk Pengendalian Dampak Negatif Pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali adalah dengan membentuk sebuah wadah Pengelolaan. Kawasan Pura Agung Besakih, badan pengelolaan tersebut adalah Manajemen Operasional (MO) Pengelolaan Kawasan Pura Agung Besakih yang didirikan sebagai bentuk sinergitas antara pemerintah Daerah dengan Desa Pakraman (desa adat) dalam menjaga keberadaan Pura Agung Besakih selain menjadi tempat persembahyangan umat hindu di Bali juga sebagai tempat daerah wisata dari dampak negatif dari aktifitas perkembangan pariwisata. Manajemen Operasional (MO) Pengelolaan Kawasan Pura Agung Besakih berdiri secara resmi pada tanggal 26 Desember 2016⁶ dan memulai operasionalnya pada tanggal 1 Januari 2016⁷ Berdasarkan pada

Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Kawasan Pura Besakih. Pertimbangan perlu didirikannya Manajemen Operasional (MO) Pengelolaan Kawasan Pura Agung Besakih dilihat dari Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Pengelolaa Kawasan Pura Besakih, bahwa melihat Pura Agung Besakih merupakan Kawasan suci dan mercusuar Pulau Bali yang memiliki kekhasan adat dan budaya yang dilandaskan pada filosofis masyarakat Hindu Bali yaitu *Tri Hita Karana*, selain itu keberadaan Pura Agung Besakih merupakan simbol dan sumber kekuatan Bali dengan jalan melaksanakan *Yadnya*, *Punia*, dan *kertih* yang wajib dilaksanakan oleh masyarakat bersama dengan pemerintah sebagai landasan pembangunan Bali yang maju, aman, damai dan sejahtera berlandaskan sastra-sastra agama Hindu, sehingga dikarenakan hal tersebut Pura Agung Besakih perlu adanya sebuah wadah pengelolaan Pura Agung Besakih yang merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan yang wajib ditata dengan baik dan profesional, dirawat bangunan fisiknya serta pelaksanaan yadnya oleh Pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten se-Bali dalam rangka kebahagiaan hidup jasmani dan rohani masyarakat Bali dan di keluarkannya Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Pengelolaa Kawasan Pura Besakih ini sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerinta Provonsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali dalam hal pemeliharaan dan pengembangan fisik dan non fisik di lingkungan Pura Agung Besakih.

Dalam pelaksanaan pengelolaan Pura Besakih, Manajemen Operasional (MO) Pengelolaan Kawasan Pura Agung Besakih memiliki struktur atau susunan Badan Pengelolaan Kawasan Pura Agung Besakih yang terdiri dari, Penasehat, Pengawas, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara, Bidang Pawongan⁸, Bidang Palemahan⁹. Jika dilihat di dalam Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Pengelolaa Kawasan Pura Besakih bahwa anggota dari Badan Pengelolaan Kawasan Pura

Agung Besakih melibatkan unsur-unsur yang terdiri atas Pemerintah Provinsi, Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali, Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi, Pemerintah Kabupaten /Kota Provinsi Bali dan Desa Pakraman Besakih. Badan Pengelolaan Kawasan Pura Agung Besakih diwajibkan melaporkan seluruh kegiatannya dan juga bertanggung jawab kepada Gubernur dan setiap 1 tahun sekali Gubernur akan mengevaluasi kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Kawasan Pura Agung Besakih, hal tersebut dikarenakan Pembentukan dan susunan Keanggotaan Badan Pengelolaan Kawasan Pura Agung Besakih ditetapkan oleh Gubernur Bali. Dalam pemilihan Ketua Badan Pengelola dilakukan pemilihan yang melibatkan seluruh anggota Badan Pengelolaan Kawasan Pura Agung Besakih, dimana ketua Badan Pengelolaan Kawasan Pura Agung Besakih diangkat untuk masa jabatan semala 4 Tahun.

Selain terdapat susunan Badan Pengelolaan Kawasan Pura Agung Besakih, juga terdapat susunana Organisasi Manajemen Operasional (MO) Pengelolaan Kawasan Pura Agung Besakih yang merupakan organisasi di bawah kewenangan Badan Pengelola dikarenakan Susunan Organisasi Manajemen Operasional (MO) Pengelolaan Kawasan Pura Agung Besakih baik pembentukannya dan struktur ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengelolaan Kawasan Pura Agung Besakih selain itu tatacara pembentukan, pengangkatan, pemberhentian dan penggantian antar waktu dari struktur Susunan Organisasi Manajemen Operasional (MO) Pengelolaan Kawasan Pura Agung Besakih juga ditetapkan melalui Peraturan Badan Pengelolaan Kawasan Pura Agung Besakih. Susunan Organisasi Manajemen Operasional (MO) Pengelolaan Kawasan Pura Agung Besakih terdiri dari Badan Pengawas yang terdiri dari Ketua dan anggota, Manager, Wakil Manager, Sekretaris, Wakil Sekretaris yang membawahi bagian Umum dan kepegawaian, bagian perencanaan, bagian keuangan, bagian pengembangan dan promosi, bagian tiket, bagian parkir, bagian pasar, bagian humas, bagian keamanan, bagian kebersihan dan

pertamanan, bagian pramuwisata. Dimana orang-orang yang menduduki Susunan Organisasi Manajemen Operasional (MO) Pengelolaan Kawasan Pura Agung Besakih diangkat untuk masa jabatan 2 tahun. Didalam Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Pengelola Kawasan Pura Besakih juga menyebutkan bahwa susunan keanggotaan Organisasi Manajemen Operasional (MO) Pengelolaan Kawasan Pura Agung Besakih untuk pertama kali dilakukan oleh Bendesa Pakrama Besakih sesuai prosedur dan ketentuan yang disepakati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Karangasem, hal tersebut menunjukkan adanya sinergi yang selaras antara desa adat khususnya desa adat besakih dengan pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam menjaga keberadaan Pura besakih melalui keberadaan Organisasi Manajemen Operasional (MO) Pengelolaan Kawasan Pura Agung Besakih yang mengelola kawasan Pura Besakih.

Adapun tugas pokok dari Badan Pengelolaan Kawasan Pura Agung Besakih adalah merumuskan kebijakan pengelolaan Kawasan Pura Agung Besakih, membentuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Organisasi Manajemen Operasional (MO) Pengelolaan Kawasan Pura Agung Besakih, menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Operasional Badan Pengelolaan Kawasan Pura Agung Besakih, menetapkan program kerjadan anggaran operasional Organisasi Manajemen Operasional (MO) Pengelolaan Kawasan Pura Agung Besakih, melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur Bali. Selanjutnya yang menjadi tugas pokok dari Organisasi Manajemen Operasional (MO) Pengelolaan Kawasan Pura Agung Besakih adalah menyusun, merumuskan, melaksanakan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan teknis operasional Organisasi Manajemen Operasional (MO) Pengelolaan Kawasan Pura Agung Besakih, melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan kepada Badan Pengelola melalui Bupati Karangasem;

Dalam mengimplementasikan bentuk sinergitas antara Desa Pakraman (Desa Adat) Khususnya Desa Pakraman (Desa Adat) Besakih dengan Pemerintah Daerah Khususnya Pemerintah Daerah Karangasem dalam hal mengelola kawasan Pura Besakih, di dalam Pasal 9 Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Kawasan Pura Besakih menyatakan bahwa Desa Pakraman (Desa Adat) Besakih dan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem membuat perjanjian kerjasama tentang pembagian pendapatan bersih yaitu 50 persen untuk Pura Besakih sendiri, 25 persen untuk Desa Pakraman (Desa Adat) Besakih, dan 25 persen untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem¹⁰ yang mana hal tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian yaitu Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Karangasem dengan Desa Pakraman Besakih Kecamatan Rendang Nomor: 075/31/III/T.Pem/2016 dan Nomor: 08/DAB/2016¹¹. Selain itu dalam Pasal 9 Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Kawasan Pura Besakih dimungkinkan kepada Organisasi Manajemen Operasional (MO) Pengelolaan Kawasan Pura Agung Besakih untuk menjalin kerjasama dalam bidang pengembangan dan promosi wisata dengan pihak ketiga namun berdasarkan atas persetujuan Badan Pengelolaan Kawasan Pura Agung Besakih.

4. Penutup

Sinergitas hukum adat dan peraturan daerah dalam pengendalian dampak pariwisata terhadap Pura Agung Besakih di Kabupaten Karangasem dapat dilihat dalam Pararem Desa Adat Besakih Nomor/38/DAB/IX/2017 dan Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Pengelola Kawasan Pura Besakih beserta Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kepariwisata Budaya Bali. Terbentuknya Manajemen Operasional (MO) Pengelolaan Kawasan Pura Agung Besakih merupakan wujud dari sinergitas hukum adat dan peraturan daerah dalam pengendalian dampak pariwisata terhadap Pura Agung Besakih di

Kabupaten Karangasem sebagaimana diatur di dalam Pararem Desa Adat Besakih Nomor/38/DAB/IX/2017 dan Peraturan Gubernur No 51 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Kawasan Pura Besakih.

Daftar Pustaka

- Balipuspanews.com, 2018, Pramuwisata Besakih Kenai Sanksi Oknum Guide, Pemerintah Minim Pembinaan, <https://www.balipuspanews.com/pramuwisata-besakih-kenai-sanksi-oknum-guide-pemerintah-minim-pembinaan.html>
- Bali tribun news. Com, 2016, Pelaku Pungutan Liar pada Wisman di Pura Besakih Sudah Diamankan <https://bali.tribunnews.com/2016/03/30/pelaku-pungutan-liar-pada-wisman-di-pura-besakih-sudah-diamankan>
- _____, 2016, WN Asing Ngaku Diperas Rp 500 ribu Masuk Besakih, Ini Tanggapan Kadis Pariwisata <https://bali.tribunnews.com/2016/03/30/wn-asing-ngaku-diperas-rp-500-ribu-masuk-besakih-ini-tanggapan-kadis-pariwisata>
- Besakih, 2017, About Us, manajemen operasional pengelolaan kawasan pura agung besakih <http://www.besakihbali.com/about-us>
- CNN Indonesia, 2016, Ada Pungutan Liar di Besakih, Pariwisata Bali Tercoreng, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160310114652-269-116495/ada-pungutan-liar-di-besakih-pariwisata-bali-tercoreng>
- Corporate borobudurpark, 2018, Manajemen Operasional Kawasan Pura Agung Besakih Bali Audiensi ke PT TWC, <http://corporate.borobudurpark.com/2018/07/31/manajemen-operasional-kawasan-pura-agung-besakih-bali-audiensi-ke-pt-twc/>
- JPN.com, 2018, Nekat, Turis Spanyol Panjat Padmasana Pura Besakih, <https://www.jpnn.com/news/nekaturis-spanyol-panjat-padmasana-pura-besakih>, lihat juga Republika, 2018, Aksi Bule Berewok di Pura Besakih Picu Kecamatan <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/04/21/p7i heg377-aksi-bule-berewok-di-pura-besakih-picu-kecamatan>
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kepariwisata Budaya Bali
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kepariwisata Budaya Bali,
- Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Kawasan Pura Besakih
- Awig-awig Desa Adat Besakih
- Pararem Desa Adat Besakih Nomor 38/DAB/IX/2017

(Footnotes)

- ¹ CNN Indonesia, 2016, Ada Pungutan Liar di Besakih, Pariwisata Bali Tercoreng, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160310114652-269-116495/ada-pungutan-liar-di-besakih-pariwisata-bali-tercoreng>
- ²Ibid
- ³Bali tribun news. Com, 2016, WN Asing Ngaku Diperas Rp 500 ribu Masuk Besakih, Ini Tanggapan Kadis Pariwisata <https://bali.tribunnews.com/2016/03/30/wn-asing-ngaku-diperas-rp-500-ribu-masuk-besakih-ini-tanggapan-kadis-pariwisata>
- ⁴Bali tribun news. Com, 2016, Pelaku Pungutan Liar pada Wisman di Pura Besakih Sudah Diamankan <https://bali.tribunnews.com/2016/03/30/pelaku-pungutan-liar-pada-wisman-di-pura-besakih-sudah-diamankan>
- ⁵JPN.com, 2018, Nekat, Turis Spanyol Panjat Padmasana Pura Besakih, <https://www.jpnn.com/news/nekaturis-spanyol-panjat-padmasana-pura-besakih>, lihat juga Republika, 2018, Aksi Bule Berewok di Pura Besakih Picu Kecamatan <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/04/21/p7i heg377-aksi-bule-berewok-di-pura-besakih-picu-kecamatan>
- ⁶Corporate borobudurpark, 2018, Manajemen Operasional Kawasan Pura Agung Besakih Bali Audiensi ke PT TWC, <http://corporate.borobudurpark.com/2018/07/31/manajemen-operasional-kawasan-pura-agung-besakih-bali-audiensi-ke-pt-twc/>
- ⁷Ibid
- ⁸Dalam hal *Pawongan* yang diartikan dalam Peraturan Gubernur No 51 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Kawasan Pura Besakih diartikan sebagai hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia, yang mana ruang lingkup yang harus dilaksanakan dalam hal *Pawongan* adalah mencakup pengaturan, pemberdayaan dan peningkatan sumber daya manusia (masyarakat) di kawasan Pura Agung Besakih dan masyarakat pengunjung Pura Agung Besakih
- ⁹Dalam hal *Palemahan* yang diartikan dalam Peraturan Gubernur No 51 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Kawasan Pura Besakih, diartikan sebagai hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungannya yang mana ruang lingkup yang harus dilaksanakan dalam hal *Palemahan* mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian hingga evaluasi terhadap keseluruhan sarana dan prasarana lingkungan di kawasan Pura Agung Besakih
- ¹⁰Balipuspanews.com, 2018, Pramuwisata Besakih Kenai Sanksi Oknum Guide, Pemerintah Minim Pembinaan, <https://www.balipuspanews.com/pramuwisata-besakih-kenai-sanksi-oknum-guide-pemerintah-minim-pembinaan.html>
- ¹¹Besakih, 2017, About Us, manajemen operasional pengelolaan kawasan pura agung besakih <http://www.besakihbali.com/about-us>